

ADVOKASI GERAKAN #MeToo DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT

Anjar Riski Maulana

20140510323

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: anjar.riski.2014@fisipol.umy.ac.id

Pendahuluan

Bermacam – macam gerakan sosial telah lama melakukan advokasi terhadap bermacam isu dan tujuan seperti perubahan iklim, hewan langka, perdagangan manusia, kesetaraan gender dan lainnya. Mereka memanfaatkan jalur komunikasi formal maupun informal untuk menggerakkan dan menyatukan orang – orang di seluruh dunia untuk mengejar maupun menentang perubahan sosial.

Keberhasilan suatu gerakan untuk mencapai tujuannya bergantung pada kemampuan gerakan tersebut untuk berhubungan dan mempengaruhi orang – orang untuk bertindak. Namun, karena keterbatasan seperti kurangnya struktur yang terpusat serta kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tujuannya, gerakan – gerakan sosial di masa kini pada umumnya memanfaatkan internet dan media sosial sebagai platform untuk menjalankan tujuan serta fungsinya sebagai sebuah cara baru yang ampuh serta hemat biaya.

Pemanfaatan platform internet dan media sosial memiliki efektivitas yang cukup tinggi sebagai sebuah bentuk komunikasi informal yang membuat sebuah gerakan sosial dapat mempengaruhi aktor yang berkedudukan lebih tinggi seperti sebuah negara di dalam proses perumusan sebuah kebijakan terhadap suatu isu yang diperjuangkan gerakan sosial tersebut. Platform internet dan media sosial juga dinilai sangat fleksibel dan terjangkau sehingga bermacam aktor dapat berpartisipasi langsung terhadap proses advokasi sebuah isu. Partisipasi dari aktor – aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang berbeda mengakibatkan keterwakilan terhadap aktor yang paling lemah di dalam sebuah isu yang menjadi advokasi sebuah gerakan sosial semakin meningkat (Xiong, Cho, & Boatwright, 2019).

Gerakan #MeToo menjadi salah satu bentuk gerakan sosial yang memanfaatkan internet dan media sosial sebagai platform utamanya. Gerakan yang berawal dari sebuah gagasan yang dicetuskan oleh Tarana Burke, seorang aktivis wanita kulit hitam Amerika Serikat pada tahun 2006 yang memiliki tujuan utama menolong korban – korban dari kasus kejahatan seksual, terutama kaum perempuan kulit hitam dan perempuan – perempuan muda yang berasal dari kondisi perekonomian rendah untuk menyembuhkan diri dari trauma serta luka fisik yang dialaminya akibat dari kejahatan seksual. Gerakan #MeToo memiliki visi yang dikutip dari situs resminya sebagai berikut:

- Mengatasi kekurangan sumber daya yang dibutuhkan oleh korban pelecehan dan kekerasan seksual
- Membangun komunitas advokat yang terdiri dari para korban, yang akan berada di garis depan untuk menggagas solusi untuk melawan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan mereka (Burke, 2018).

Pada awal kemunculannya, gerakan #MeToo menggunakan jalur komunikasi formal, yaitu dengan mengadakan pertemuan – pertemuan langsung, penyebaran melalui pamphlet dan metode konvensional lainnya dan memiliki target audiens yang lebih spesifik sehingga gerakan ini masih belum memiliki penyebaran yang luas. Hingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 2017, seorang aktris Amerika Serikat, Alyssa Milano, yang mengunggah sebuah cerita tentang pengalamannya mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang produser film ternama di industri perfilman Amerika Serikat yang bernama Harvey Weinstein dengan menggunakan tagar #MeToo di media sosial Twitter (Kantor & Twohey, 2017).

Pasca unggahan tersebut, tagar #MeToo menjadi sebuah tren yang disebarkan hingga 200,000 kali dalam dua puluh empat jam pertama dan jumlah tersebut semakin meningkat hingga akhir tahun 2017 (Respers, 2017). Tagar #MeToo telah menjadi viral di seluruh dunia, dan Milano, yang pertama kali mengunggah tagar tersebut, mengakui bahwa ia mendapatkan gagasan tersebut berdasarkan gerakan yang dimulai oleh Tarana Burke.

Sejak saat itu, gerakan #MeToo oleh Burke semakin berkembang dengan mengincar target audiens yang lebih luas (kaum perempuan dari segala ras, kaum laki – laki, kaum LGBTQ+, dan segala tingkat status pendidikan, ekonomi, dan sosial lainnya) dan memanfaatkan jalur komunikasi internet dan media sosial dan menyebar ke penjuru dunia dalam bentuk tagar yang sama atau tagar yang berbeda namun memiliki tujuan serupa dan menjadikan tagar #MeToo sebagai latar belakang munculnya tagar – tagar baru tersebut. Organisasi resmi serta gerakan – gerakan sosial lain yang bergerak dalam advokasi terhadap kesetaraan gender dan kasus – kasus kejahatan seksual juga turut menjadikan gerakan #MeToo

sebagai inspirasi untuk semakin mengencarkan tujuan mereka (Xiong, Cho, & Boatwright, 2019).

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Amerika Serikat merupakan sebuah isu penting dan darurat akan bahaya serta jumlah kejadiannya, namun sebagaimana umumnya perlakuan terhadap kejahatan seksual di seluruh dunia, Amerika Serikat masih menganggap remeh laporan – laporan yang muncul dari para korban tindak kejahatan tersebut. Sebuah laporan dari tahun 2013 menyatakan bahwa kasus pemerkosaan di Amerika Serikat masih banyak yang tidak dilaporkan atau tidak dapat dilaporkan sama sekali (National Research Council, 2013).

Selain itu, terdapat laporan dari tahun 2014 bahwa terdapat kecenderungan kepolisian di Amerika Serikat untuk menghapus atau mengurangi jumlah kasus pemerkosaan yang telah tercatat di laporan resmi untuk memberikan kesan bahwa kepolisian telah berhasil memerangi kasus kejahatan seksual (Yung, 2014). Adanya kecenderungan ini turut menjadi penyebab semakin sulitnya kasus kejahatan seksual ditangani di Amerika Serikat dan semakin enggan para korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Korban merasa bahwa melaporkan tindak kejahatan seksual merupakan perbuatan yang sia – sia. Sistem yang ada untuk mengatur bagaimana proses pelaporan kasus kejahatan seksual juga dinilai masih rumit, panjang, dan umumnya berujung hanya sebatas konseling dan penyelesaian kasus secara damai. Ketidakseriusan dalam penanganan kejahatan seksual juga timbul akibat stigma terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual, kecenderungan untuk menyalahkan korban, dan lemahnya posisi korban untuk melawan pelaku – pelaku kejahatan seksual yang umumnya pihak – pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dari korbannya.

Hadirnya gerakan #MeToo di Amerika Serikat telah membawa perubahan bagaimana pemerintah Amerika Serikat, penegak hukum dan masyarakatnya memandang kasus – kasus kejahatan seksual. Secara perlahan, para korban telah memberanikan diri untuk membuat pengakuan dan menceritakan pengalamannya mendapatkan pelecehan dan kekerasan seksual. Laporan – laporan atas kekerasan seksual ditangani dengan lebih serius. Proses pelaporannya disederhanakan dan menambahkan lebih banyak bala bantuan untuk kebutuhan para pelapor untuk menjalankan kasusnya. Kesulitan lain yang dialami oleh para korban pelecehan seksual, yaitu sumber daya untuk melangsungkan proses penanganan kasusnya, telah ditangani oleh banyak program – program yang diadakan untuk mendanai para korban yang tidak sanggup mendanai dirinya sendiri.

Dinamika Kejahatan Seksual Di Amerika Serikat Sebelum Munculnya Gerakan #MeToo

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (US Department of Justice) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “seluruh aksi seksual yang non-konsensual yang dilarang oleh hukum *Federal, Tribal*, atau *State*, termasuk kondisi dimana korbannya tidak memiliki kemampuan untuk konsen (The United States Department of Justice, 2019).” Tiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kode hukum yang berbeda. Sehingga definisi bentuk tindakan kekerasan yang tergolong sebuah tindakan criminal, termasuk kekerasan seksual, dapat beragam dari satu negara bagian dengan negara bagian lain.

Amerika Serikat merupakan sebuah negara dengan penduduk sebanyak 330,377,563 jiwa menurut estimasi tahun 2019, dengan rasio laki laki dan perempuan sebesar 0.98 (980 laki – laki per 1000 perempuan). Rasio tersebut memperlihatkan bahwa selisih antara jumlah penduduk laki – laki dan perempuan di negara tersebut tidak begitu besar. Namun ketika membahas kasus kejahatan seksual, terdapat selisih besar bagaimana laki – laki dan perempuan menjadi korban atau pelaku dari kejahatan tersebut. Sebuah penelitian dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah membuktikan bahwa 91% korban pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya adalah perempuan (Rennison, 2002).

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering tidak dilaporkan. Sekitar 63% dari seluruh kasus pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya di Amerika Serikat tidak dilaporkan oleh para korbannya berdasarkan penelitian oleh Departemen Kehakiman (Rennison, 2002). Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang permasalahan pada bab pendahuluan penelitian ini, terdapat beberapa faktor mengapa korban kejahatan seksual memilih untuk tidak melaporkan kasusnya. Faktor – faktor tersebut muncul akibat adanya stigma buruk terhadap kasus kejahatan seksual, kecenderungan untuk menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya, serta kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan seksual untuk mengintimidasi korbannya. Akibat dari hal – hal tersebut, korban pelecehan dan kekerasan mendiamkan kasusnya, dan ini berakibat pula terhadap semakin maraknya kasus kejahatan seksual akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah tersebut.

Padahal tanpa disadari, kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang paling merugikan secara materil, penelitian Departemen Kehakiman lainnya tentang kerugian korban kejahatan seksual membuktikan bahwa kerugian akibat pemerkosaan di Amerika Serikat mencapai angka sebesar \$127 miliar, sedangkan dibandingkan dengan jenis kejahatan lain yang lebih dianggap serius oleh pihak berwajib seperti pembunuhan yang hanya sebesar \$71 miliar dan kecelakaan lalu lintas sebesar \$61 miliar (Miller, Cohen, & Wiersema, 1996). Kejahatan

seksual telah terbukti membawa kerugian materil bagi korban maupun negara. Kerugian ini bersumber dari biaya – biaya yang harus dikeluarkan korban untuk menempuh jalur hukum, tindakan perawatan oleh lembaga kesehatan, dan akibat dari kehilangan pekerjaan atau usaha yang dimiliki oleh korban sebagai dampak lanjutan dari kejahatan seksual yang dialaminya.

Hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual tergantung dengan jenis dan tingkatan dari tindakan yang dilakukannya. Bentuk kejahatan seksual yang paling umum adalah pelecehan secara verbal, yaitu komentar – komentar oleh pelaku terhadap korbannya yang memiliki sifat menjerus dan membuat korbannya tidak nyaman. Dalam tahap ini, menentukan apakah sang pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakannya masih sangat sulit akibat kurangnya bukti langsung yang dapat dilihat dari korbannya. Sehingga pelecehan dalam bentuk verbal umumnya tidak dilaporkan oleh para korbannya. Variasi lain dari bentuk tindakan serupa adalah melalui internet dan media sosial, yang umumnya disebut pelecehan seksual *cyber*. Dalam kasus ini, membuktikan sebuah tindak pelecehan *cyber* lebih mudah dibandingkan tindak verbal karena kemampuan lebih untuk menyertakan bukti dengan cara seperti melakukan tangkapan layar yang menunjukkan langsung tulisan oleh pelaku yang memiliki sifat melecehkan secara seksual. Bentuk lain dari pelecehan seksual *cyber* yang lebih parah adalah *spying* atau memata – matai. Pelaku dapat menggunakan internet dan media sosial untuk mengeksploitasi gambar dan/atau video pribadi korbannya untuk penggunaan pribadi atau melecehkannya secara public dengan menyebarkannya.

Tindakan kejahatan seksual yang memiliki tingkatan lebih diatas pelecehan secara verbal dan *cyber* adalah kontak langsung secara fisik antara pelaku dan korban melalui sentuhan. Ini merupakan tahap yang berada dalam satu tingkatan lebih rendah daripada pemerkosaan. Dalam tahap ini, pelaku telah menyentuh anggota tubuh korbannya, umumnya bagian tubuh yang intim hingga kemaluan, tanpa persetujuan dari korbannya. Tahap ini masih menjadi jenis tindak pelecehan yang sulit ditemukan bukti untuk memproses pelaku secara hukum karena kecenderungan korban untuk tidak segera melaporkan kejadiannya begitu terjadi. Semakin lama korban menutupi kejadian, maka bukti – bukti yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk bukti visum akan semakin menghilang dan sulit ditemukan.

Pemerkosaan merupakan tingkatan tertinggi dalam jenis – jenis kejahatan seksual. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengkategorikan bentuk tindakan yang tergolong pemerkosaan apabila terdapat tindakan penetrasi yang dialami oleh vagina atau anus oleh sebuah organ tubuh ataupun objek lainnya dengan paksaan atau dengan kata lain, tanpa adanya persetujuan dari korbannya atau tidak adanya kemungkinan untuk korbannya untuk

menyatakan konsen. Pemerkosaan merupakan jenis kejahatan seksual yang cukup marak walaupun lebih rendah dibandingkan pelecehan secara verbal. Pembuktian untuk kasus pemerkosaan juga lebih mudah untuk didapatkan karena tindakan penetrasi seksual yang dipaksakan umumnya akan meninggalkan bekas yang dapat dilihat oleh tim visum kepolisian maupun pihak non-kepolisian. Namun kasus pemerkosaan juga masih banyak yang melibatkan tindakan lain seperti pembunuhan oleh pelakunya. Terdapat beberapa faktor mengapa pelaku pemerkosaan cenderung membunuh korbannya, yaitu untuk membungkam korbannya dan menyembunyikan bukti keterlibatannya atau terbunuh secara tidak sengaja.

Sebelum bangkitnya gerakan #MeToo, pelaku kejahatan seksual nyaris tidak dapat disentuh sama sekali. Tuduhan – tuduhan yang dilayangkan kepada mereka umumnya akan cepat lenyap seakan tidak pernah mendapat tuduhan sama sekali. Sekalipun laporan atau tuduhan yang dilayangkan terhadap suatu pelaku diproses oleh penegak hukum, kecil sekali kemungkinan untuk korban mendapatkan keadilan dengan adanya tindakan persekusi terhadap pelaku. Terutama mengingat bahwa pelaku kejahatan seksual umumnya merupakan orang – orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih tinggi dari korbannya. Kasus kejahatan seksual sangat marak terjadi di lingkungan pekerjaan. Para petinggi perusahaan, politisi, pejabat pemerintah, selebriti, bahkan oknum penegak hukum sendiri menjadi pelaku – pelaku kejahatan seksual.

Dikenal sebuah istilah *casting couch* yang pertama kali muncul di dalam industri perfilman Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hollywood, yang memiliki makna sebuah taktik yang dilakukan oleh para petinggi di dalam sebuah industri untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara seksual dengan memanfaatkan posisinya untuk memperdaya atau mengintimidasi seseorang yang bekerja untuknya dalam bentuk memberikan iming – iming kenaikan jabatan, upah, atau koneksi yang lebih luas (Zimmer, 2017). Tuduhan – tuduhan terhadap Harvey Weinstein yang menjadi awal mula viralnya penyebaran gerakan #MeToo merupakan sebuah hal yang melatarbelakangi fenomena *casting couch* yang memiliki kehadiran serupa di ranah lain diluar industri perfilman. Figur – figur yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar memanfaatkan posisinya untuk melakukan kejahatan seksual terhadap orang – orang yang lebih lemah, umumnya merupakan bawahannya sendiri. Mereka menggunakan segala bentuk tekanan dan paksaan untuk mengeksploitasi bawahannya secara seksual dan mengupayakan segala cara agar apa yang telah terjadi tidak akan keluar dari ruang pribadinya.

Dinamika Kejahatan Seksual Di Amerika Serikat Setelah Gerakan #MeToo

Gerakan #MeToo bangkit pada waktu yang dinilai oleh banyak pihak di Amerika Serikat sebagai masa genting akibat dari fenomena *casting couch* yang sangat merugikan seluruh pihak yang memiliki potensi mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Kemunculan awalnya di industri perfilman telah membawa pengaruh besar bagaimana pentingnya menyuarakan pengalaman pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami oleh para korbannya.

Setelah Alyssa Milano mengunggah sebuah unggahan di media sosial Twitter dengan tagar #MeToo pada siang hari tanggal 15 Oktober 2017, malam harinya tagar tersebut telah digunakan sebanyak 200,000 kali. Keesokan harinya pada tanggal 16 Oktober 2017, tagar tersebut telah mencapai 500,000 unggahan. Tidak hanya di Twitter, media sosial Facebook juga menjadi platform persebaran tagar #MeToo dengan penggunaan sebesar 4.7 juta orang di dalam 12 juta unggahan selama 24 jam pertama. Facebook melaporkan bahwa setidaknya empat puluh lima persen pengguna memiliki teman yang mengunggah sebuah unggahan dengan tagar tersebut (Respers, 2017).

Tingginya aktivitas penyebaran di media sosial memungkinkan gerakan #MeToo untuk mempengaruhi tindakan nyata para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk melaporkan kasus yang dialaminya secara hukum. Komisi Peluang Kerja Sama AS melaporkan bahwa terdapat kenaikan jumlah pengaduan oleh para pekerja dibandingkan satu dekade lalu. Komisi tersebut menyebutkan bahwa tuntutan – tuntutan memenuhi tahun fiskal 2018 yang jatuh pada tanggal 30 September meningkat jumlahnya sebanyak 12% dibanding tahun – tahun sebelumnya (Wiessner, 2018). Victoria Lipnic, pejabat sementara Direktur Komisi Peluang Kerja Sama AS menyatakan bahwa kenaikan tersebut merefleksikan terhadap “meningkatnya angka permintaan akibat dari gerakan #MeToo.” Jumlah tuduhan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang diterima oleh Komisi Peluang Kerja Sama telah turun sejak tahun 2010 ketika hamper 8000 kasus dilaporkan. Advokat pekerja dan kelompok – kelompok hak wanita mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan akibat dari keputusan para korban untuk tidak melaporkan kasusnya.

Warta berita USA Today melaporkan bahwa di dalam 24 bulan terakhir terhitung sejak Oktober 2018, satu tahun sejak viralnya gerakan #MeToo, Kongres Amerika Serikat dan badan legislatif di tiap 50 negara bagian telah meloloskan lebih dari 2,000 RUU yang mengandung kata “seksual” dan istilah – istilah tren seperti “*me too*”, “*rape kits*”, dan “*non-disclosure*.” Sejak dimulainya tagar #MeToo, pejabat – pejabat terpilih telah meloloskan 261 rancangan hukum yang membahas topik – topik yang dibahas oleh gerakan – gerakan pejuang wanita,

jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 238 (Kelly & Hegarty, 2018).

Reaksi yang muncul dari publik Amerika Serikat terkait dengan viralnya gerakan #MeToo dan tuduhan – tuduhan terhadap figur – figur Hollywood dan politik bermacam – macam dari tiap golongan. Kepedulian terhadap isu kejahatan seksual memiliki perhatian lebih di golongan liberal Amerika daripada golongan konservatif. Golongan liberal Amerika Serikat meyakini bahwa isu kejahatan seksual merupakan sebuah isu yang penting untuk dibahas mengingat banyaknya korban yang berasal dari golongan minoritas. Kaum perempuan, terutama yang berasal dari golongan marginal, paling rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Golongan konservatif Amerika Serikat masih menilai bahwa isu kejahatan seksual masih belum menjadi isu genting untuk dibahas. Konservatif justru menganggap bahwa munculnya gerakan #MeToo cenderung menjadi sebuah taktik politis untuk menjatuhkan Presiden Donald Trump, yang mendapatkan belasan tuduhan pelecehan seksual sejak masa kampanyenya hingga viralnya tagar #MeToo.

Gerakan #MeToo turut membawa perubahan dinamika pada ranah perpolitikan di Amerika Serikat. Menjelang diadakannya pemilihan *mid-term* 2018, #MeToo telah menyeret segelintir politisi dan pejabat negara Amerika Serikat dengan tuduhan – tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual. Salah satu figur yang mendapatkan sorotan yang tidak kalah banyak dari Trump adalah Brett Kavanaugh, yang sekarang menjabat sebagai Hakim Agung Pengadilan Tinggi AS. Kavanaugh mendapatkan tuduhan pelecehan seksual dari salah satu mantan teman sekolah menengah atasnya, yaitu seorang professor psikologi dari Universitas Palo Alto, Christine Blasey Ford, yang menceritakan pengalamannya dilecehkan oleh Kavanaugh semasa sekolah. Laporan serupa juga datang dari alumni se-almamater Kavanaugh dan Ford lainnya. Kemunculan tuduhan – tuduhan tersebut sering dikaitkan dengan dampak dari viralnya gerakan #MeToo.

Tuduhan terhadap Trump dan Kavanaugh membuat aktifitas gerakan #MeToo untuk mengungkap kejahatan seksual di badan politik Amerika Serikat semakin gencar. Isu – isu yang berhubungan dengan pelecehan dan kekerasan seksual menjadi sebuah isu terpopuler yang diangkat oleh para kandidat politik Amerika Serikat dalam kampanye – kampanye yang dilakukan oleh mereka untuk perebutan kursi di senat dan kongres. Dampak lain yang ditimbulkan adalah meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam pencalonan untuk jabatan politik di pemilihan *mid-term* 2018. Tercatat bahwa 472 orang perempuan yang mencalonkan diri untuk kursi di kongres, dan 57 orang perempuan untuk kursi di senat pada pemilihan tersebut. Jumlah tersebut meningkat sangat pesat dibanding tahun – tahun

sebelumnya dan memecahkan rekor tertinggi pada dekade ini dibandingkan dengan tahun 2012 dimana terdapat 298 calon anggota kongres perempuan dan 36 calon anggota senat perempuan. Jumlah calon gubernur perempuan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Amerika, yaitu 78 orang. Mayoritas dari kandidat perempuan pada pemilihan mid-term 2018 berasal dari Partai Demokrat. Menurut laporan NBC, 50% dari jumlah total 254 kandidat senat selain yang sedang menjabat dari Partai Demokrat adalah perempuan. Jumlah ini jauh dari kondisi Partai Republik pada ranah yang sama, yaitu hanya 18% dari jumlah keseluruhan kandidat senat Partai Republikan (Talbot, 2018).

Pemilihan *mid-term* 2018 Amerika Serikat melihat sebuah fenomena baru yang berbeda dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan jumlah pemilih tetap terdaftar yang tertinggi sejak tahun 1914 untuk pemilihan *mid-term*. Peningkatan juga terlihat pada jumlah pemilih tetap terdaftar dibawah usia 30 tahun (generasi milenial), yaitu 31%. Walaupun lebih rendah dibandingkan pemilihan pada tahun 2016 yang berjumlah 51 persen, namun jumlah pemilih muda meningkat jauh dibandingkan dengan pemilihan *mid-term* sebelumnya. Hal ini dikarenakan secara umum partisipasi pemilihan presiden umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan *mid-term* yang hanya memilih badan legislatif dan gubernur federal. Gerakan #MeToo menjadi salah satu faktor yang dikaitkan dengan adanya fenomena tersebut. Generasi milenial pada umumnya lebih peduli terhadap isu – isu sosial seperti kejahatan seksual dibandingkan generasi yang lebih tua. Mereka menuntut adanya perubahan dalam bagaimana kasus – kasus kejahatan seksual dapat ditangani oleh penegak hukum.

Gerakan #MeToo yang mempengaruhi partisipasi politik generasi milenial telah membuahkan kemenangan bagi banyak kandidat perempuan yang menjadikan kasus – kasus pelecehan seksual sebagai motivasi mencalonkan diri dan terjun ke dunia politik. 118 orang perempuan telah memenangkan kursi untuk kongres, melebihi rekor sebelumnya yaitu 107 orang, dan 31 diantaranya merupakan anggota kongres baru, melebihi rekor sebelumnya pada tahun 1992 yang disebut dengan “year of the women” dengan jumlah 20 anggota kongres baru yang merupakan perempuan. Tujuan lain #MeTo yang berupaya untuk memperjuangkan hak wanita kulit hitam juga telah membuahkan hasil. Dari 118 kandidat perempuan yang terpilih untuk kongres. 42 diantaranya adaah wanita kulit berwarna.

Langkah – Langkah Advokasi Gerakan #MeToo Dalam Penanganan Terhadap Kejahatan Seksual Di Amerika Serikat

Transnational Advocacy Network (TAN) adalah bentuk-bentuk organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran serta pola komunikasi yang bersifat sukarela, resiprokal, dan setara (horizontal). Konsep jaringan tersebut dapat berjalan dengan baik karena menekankan pada relasi yang bersifat fleksibel dan tidak tertutup di antara aktor-aktor yang bekerja dalam area isu-isu tertentu. Keck & Sikkink menyebut mereka sebagai jaringan advokasi karena mereka mengadvokasi dengan saling mendukung perkara yang diajukan oleh pihak lain. Keck & Sikkink juga menyatakan bahwa jaringan advokasi transnasional bersifat unik karena mereka tertata untuk mempromosikan suatu masalah, gagasan, norma-norma, dan sering melibatkan individu untuk ikut mengadvokasi perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1999).

Jaringan Transnasional mencari pengaruh pada banyak pihak dengan cara – cara yang sama yang dilakukan oleh kelompok politik atau pergerakan sosial lainnya. Tetapi karena jaringan tersebut tidak memiliki kekuatan dalam artian secara tradisional, maka Jaringan Transnasional harus mengandalkan kekuatan dalam informasi, gagasan, dan strategi untuk mengubah informasi dan konteks nilai yang ada didalamnya. Walaupun umumnya yang dilakukan oleh Jaringan Transnasional dapat dikategorikan sebagai persuasi, makna tersebut tidak cukup tepat untuk digunakan secara teoritis. Terdapat beberapa tipologi taktik yang digunakan oleh aktor – aktor non-negara untuk melakukan persuasi dan sosialisasi, yaitu:

1. Information Politics

Information Politics adalah kemampuan untuk memperoleh informasi dengan cepat dan meyakinkan, berguna dalam politik, dan mengarahkan informasi tersebut kepada dampak atau pengaruh yang luas.

2. Symbolic Politics

Symbolic Politics adalah kemampuan untuk menggunakan simbol – simbol, aksi, ataupun sebuah narasi yang memiliki kemampuan menggambarkan suatu kejadian bagi spektator yang berada di lingkungan yang jauh.

3. Leverage Politics

Leverage Politics adalah kemampuan untuk menyerukan aktor – aktor dengan kekuatan dan pengaruh yang dapat mempengaruhi sebuah situasi dimana pihak – pihak lemah dalam sebuah jaringan tidak memungkinkan untuk memberi pengaruh.

4. Accountability Politics

Accountability Politics adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga aktor – aktor yang kuat dan berpengaruh tersebut untuk menjalankan kebijakan maupun prinsip yang telah disahkan.

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam penjelasan kerangka teoritis Jaringan Advokasi Transnasional diatas, terdapat empat tipologi taktik yang akan menjadi sebuah elemen krusial dalam menjawab pertanyaan oleh penulis dalam penelitian ini.

Gerakan #MeToo sangat memiliki basis kuat dalam media sosial dan teknologi informasi masa kini (Internet) sebagai platform utama yang mengakibatkan muncul serta berkembangnya gerakan ini pada awalnya. Berkat penyebaran kesadaran terhadap gerakan ini serta bahaya dari pelecehan dan kekerasan seksual, maka mengakibatkan meluasnya keikutsertaan dari korban – korban yang berasal dari beragam kalangan, negara, dan suku bangsa.

Gerakan #MeToo telah menjadi sebuah simbol atau perwujudan harapan bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk mengupayakan keadilan bagi mereka dan para pelaku, serta menunjukkan krisis yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan perpolitikan di Amerika Serikat bagi seluruh penjuru dunia.

Dengan adanya partisipasi selebriti dan figur politik ternama menyuarakan pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami, maupun yang menjadi pelaku, menyebabkan isu ini menjadi isu relevan untuk dibahas dan mewakili suara – suara rakyat yang selama ini kurang diperhatikan karena tidak memiliki perwakilan yang cukup berpengaruh sebelumnya. Korban yang tidak memiliki latar belakang kehidupan yang berpengaruh umumnya tidak akan begitu diperdulikan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ditimpanya, terutama tanpa didukung dengan dukungan legal yang mumpuni dimana tidak seluruh kalangan sanggup untuk mendapatkannya.

Pelecehan dan kekerasan seksual telah menjadi sebuah masalah yang tidak bisa dianggap remeh, terutama di Amerika Serikat yang telah memulai registrasi terhadap pelaku pelecehan seksual sejak tahun 1947 di negara bagian California (State of California Departement of Justice, 2015). Dengan adanya registrasi tersebut, maka pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dapat dipantau pergerakannya agar mencegah mereka mendapatkan jabatan prestisius atau posisi penting yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Gerakan #MeToo

Ketika gerakan #MeToo digagas pertama kali oleh Tarana Burke pada tahun 2006, media sosial belum memiliki relevansi sebagaimana di masa sekarang. Pergerakan #MeToo

oleh Burke umumnya hanya sebatas aktifitas di dunia nyata yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga selama sebelas tahun hingga munculnya tagar #MeToo yang dipicu oleh Alyssa Milano, gerakan yang dijalankan oleh Burke memang tidak begitu diketahui oleh khalayak ramai. Unggahan Milano telah mewujudkan dirinya sebagai bentuk nyata *triggering event* yang memicu partisipasi dari banyak pengguna media sosial lainnya hingga menjadi sebuah tagar yang viral. Pemberitaan terhadap gerakan #MeToo oleh media online maupun offline semakin gencar akibat dampak yang ditimbulkannya pada internet dan media sosial serta pengupasan kebenaran tentang figur – figur kuat dan berpengaruh di Hollywood. #MeToo kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi gerakan yang viral dan memiliki relevansi tinggi dalam perjuangan melawan kejahatan seksual dengan terus mendorong para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bersuara dan melapor. Hingga munculnya aksi – aksi langsung yang didasarkan pada bangkitnya gerakan #MeToo seperti Women’s March, #TimesUp, dan lainnya.

Kemajuan telekomunikasi telah berkontribusi besar terhadap kemampuan manusia untuk mengerti dan memahami bahasa yang asing baginya. Tagar #MeToo yang berasal dari bahasa Inggris dapat dipahami dan diserapi oleh negara – negara dengan bahasa berbeda sesuai dengan kosakata dan makna yang sesuai dengan bahasanya tanpa mengubah esensi dari kemunculan tagar tersebut pada awalnya. Gerakan #MeToo telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia tanpa mengubah pesan yang berusaha disampaikan.

Nilai – nilai yang hidup dalam gerakan #MeToo memang didominasi oleh nilai – nilai liberalis. Para penggiat gerakan menganggap bahwa konservatisme menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kasus – kasus kejahatan seksual. Budaya patriarki yang dominan menyebabkan kaum perempuan dianggap lebih rendah sehingga rentan untuk mendapatkan perlakuan yang merendahkan. Dalam kepercayaan agama dan kebudayaan tertentu menilai bahwa perempuan wajib untuk memuaskan suaminya dalam kondisi apapun, dan menganggap bahwa konsen tidak dibutuhkan dari sisi perempuan. Hal ini menyebabkan pemerkosaan dalam pernikahan bukan merupakan suatu hal yang aneh. Padahal, esensinya pemerkosaan tetap merupakan pemerkosaan. Baik di dalam ikatan pernikahan maupun tidak. #MeToo dalam hal ini dapat mempengaruhi segala kalangan dari latar belakang suku bangsa, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dan memiliki nilai – nilai nya sendiri.

Gerakan #MeToo Sebagai Simbol Bagi Korban Pelecehan Seksual

Gerakan #MeToo lahir sebagai akibat dari kesadaran para korban seksual bahwa membungkam diri terhadap kejahatan yang dialaminya tidak akan menyelesaikan apapun dan hanya membuat hal yang sama dapat terjadi berulang kali terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Tarana Burke menggagas #MeToo setelah mendengar cerita dari seorang anak perempuan yang ditemuinya bertahun – tahun lalu. Burke menyadari bahwa sebuah simbol dibutuhkan untuk para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bersatu dan memperjuangkan keadilan yang pantas mereka dapatkan, begitupula dengan pelakunya. Dengan adanya #MeToo, Burke berharap bahwa para korban pelecehan dan kekerasan seksual yang belum menyuarakan pengalamannya dapat berani untuk berbicara. Ia sangat memahami pentingnya untuk bersuara agar khalayak umum yang belum memahami gentingnya kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual agar dapat lebih memahami hal tersebut, sehingga stigma buruk dapat secara perlahan mulai dihilangkan dan konsekuensi terhadap para pelaku dapat diterapkan secara pantas.

Tagar – tagar lain bermunculan setelah penyebaran luas gerakan #MeToo di seluruh dunia. Versi lain dari #MeToo seperti #MoiAussi di Kanada dan #WoYeShi di China telah berhasil menjalankan tujuan dari gerakan #MeToo di negara masing – masing tanpa mengubah esensi dari #MeToo itu sendiri. Penulis memilih untuk membahas #MeToo sebagai fokus dalam penelitian ini karena #MeToo merupakan induk dari beragam macam tagar – tagar dan gerakan – gerakan tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang bermunculan di media sosial. Warta berita, pakar, peneliti, serta figur – figur berpengaruh yang menyebarkan informasi tentang kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual setelah bulan Oktober tahun 2017 pada umumnya menjadikan gerakan #MeToo sebagai rujukan mereka.

Peran Selebriti Dan Politisi Dalam Kesuksesan Penyebaran Gerakan #MeToo

Gerakan #MeToo sebagai sebuah gerakan sosial membutuhkan dukungan dari aktor – aktor yang kuat untuk dapat melakukan advokasi dalam masalah kejahatan seksual di Amerika Serikat. Dalam *Transnational Advocacy Network*, taktik ini dikenal dengan sebutan *leverage politics* (Keck & Sikkink, 1999). Gerakan sosial membutuhkan partisipasi dari aktor – aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi munculnya sebuah *trigger event* yang kemudian membuat isu yang berusaha diangkat menjadi relevan untuk pembahasan oleh masyarakat.

Kesuksesan gerakan #MeToo tidak dapat mengesampingkan aktor yang telah berhasil mengangkat tagar dan gerakan tersebut pada awalnya, yaitu selebriti. Di masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa orang – orang yang memiliki ketenaran, secara otomatis memiliki

kemampuan untuk mengangkat sebuah isu tertentu walaupun ia tidak memiliki keahlian secara khusus di dalam isu tersebut. Gerakan #MeToo telah membuktikan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang dapat terjadi kepada siapapun, bahkan kalangan seperti selebriti yang pada umumnya dianggap memiliki kehidupan yang lebih dibandingkan dengan kalangan yang lebih awam.

Suatu esensi yang berusaha diperlihatkan oleh #MeToo adalah *relatability*, dalam hal ini. #MeToo berusaha memperlihatkan bahwa semua orang, tidak memandang status, ras, agama, suku bangsa, dan kebudayaan, dapat mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Selebriti yang menggiatkan gerakan #MeToo telah berhasil menjalankan nilai tersebut. Mereka telah berhasil mencontohkan keberanian untuk bersuara dan menceritakan serta melaporkan kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami. Mereka menyadari akan keistimewaan yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk menggerakkan massa berjumlah besar untuk meramaikan sebuah tujuan.

Kelahiran ME TOO CONGRESS ACT

Pada bulan November tahun 2017, seorang anggota kongres Amerika Serikat, Jackie Speier, mengajukan sebuah rancangan undang – undang yang dinamakan *Member and Employee Training and Oversight on Congress Act (ME TOO Congress Act)* yang dinamakan dari gerakan #MeToo. Rancangan ini berupaya untuk mengamandemen undang – undang serupa yang mengatur tentang pelecehan dan kekerasan seksual di dalam ranah kongres yang bernama *Congressional Accountability Act of 1995*. Speier mengajukan rancangan undang – undang baru karena menganggap bahwa undang – undang lama mengakibatkan proses pengaduan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhambat karena harus melalui sebuah kantor pengaduan yang membutuhkan kerahasiaan dalam pelaporannya dan melalui proses konseling dan mediasi yang lama sebelum pelaporan kasus dapat diajukan. Adanya proses yang rumit serta panjang kerap menyebabkan pengajuan kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual cenderung tidak berakhir dengan baik. Para pelaku dengan mudah dapat menghindari konsekuensi akibat perbuatannya (Davis, 2017).

Dalam *ME TOO Congress Act*, Speier mengajukan beberapa perubahan, diantaranya adalah:

- Menghapuskan syarat untuk proses konseling dan mediasi selama 30 hari sebelum pelaporan resmi dapat diajukan.

- Menciptakan sebuah proses konseling baru yang bersifat opsional, tidak mengekang, dan dapat menyediakan saran hukum dan perwakilan hukum bagi para pelapor.
- Menghapus syarat bagi para pelapor untuk menandatangani perjanjian tertutup untuk mengajukan laporan, walaupun perjanjian tertutup tetap diperbolehkan sebagai bagian dari negosiasi penyelesaian masalah.
- Membuat sistem online untuk melaporkan keluhan.
- Mewajibkan para pembuat undang – undang untuk membayar denda dari segala tuntutan yang dimenangkan korban apabila mereka tertuduh sebagai pelaku pelecehan, tuntutan lain tetap dibayarkan oleh para pembayar pajak
- Mewajibkan keterbukaan dalam pembahasan denda ketika tuntutan dimenangkan dan keterbukaan dalam menentukan jumlah denda.
- Mewajibkan sebuah survey secara anonim terhadap pejabat kongres setiap dua tahun
- Memperluas perlindungan pelecehan kepada seluruh jajaran kongres dari tingkatan teratas hingga yang terbawah.

Rancangan undang – undang tersebut lahir dari pemikiran Speier bahwa “kebijakan *zero tolerance* (terhadap kasus pelecehan seksual) akan percuma apabila tidak didukung dengan pelaksanaan dan akuntabilitas.” Undang – undang ini merupakan langkah tambahan dari langkah terbaru kongres dan senat untuk mewajibkan pelatihan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang sebelumnya bersifat opsional.

Speier telah menjadi penyuar penting terkait perlawanan pelecehan dan kekerasan seksual di Capitol Hill sejak ia menceritakan pengalamannya mendapatkan pelecehan seksual dari seorang kepala staff beberapa dekade lalu ketika ia masih menjabat sebagai pendamping kongres. Ia bertestimoni pada sebuah sidang kongresional bahwa ia menyadari dan mengetahui adanya dua anggota kongres yang telah melakukan kejahatan seksual, namun ia menolak untuk mengungkapkan persisnya siapa pelaku kasus tersebut karena menghargai korbannya yang tidak ingin terangkat namanya.

Dengan lahirnya *ME TOO Congress Act*, dapat dilihat bahwa gerakan #MeToo telah memicu para pembuat kebijakan untuk dapat menjalankan akuntabilitas mereka terhadap apa yang telah mereka rumuskan. Proses untuk menghapuskan kejahatan seksual masih menjadi perjalanan panjang bagi pemerintah Amerika Serikat. Namun, upaya untuk menangani kasus di dalam ranah legislatif sudah menjadi sebuah tindakan yang perlu diapresiasi.

Kesimpulan

Gerakan #MeToo memiliki permulaan sebagai sebuah gerakan eksklusif yang berfokus pada korban pelecehan dan kekerasan seksual yang berasal dari golongan marginal di Amerika Serikat ketika dicetuskan dan didirikan pertama kali oleh Tarana Burke pada tahun 2006. Namun perjuangannya mulai tumbuh dan berkembang akibat dari unggahan Alyssa Milano yang memiliki tujuan awal membongkar eksploitasi seksual yang tumbuh mendarah daging di industri perfilman dengan melaporkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein, yang kemudian diikuti oleh jutaan pengguna media sosial di Amerika dan seluruh dunia.

Amerika Serikat merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang mengalami darurat kejahatan seksual. Negara adikuasa tersebut setelah sekian abad menyimpan derita – derita korban yang perlahan mulai menggerogoti bangsanya dan memicu kebutuhan akan perubahan. Amerika Serikat memang memiliki sistem – sistem, badan, dan aturan yang mengatur bagaimana kasus kejahatan seksual ditangani, namun kurangnya kepekaan dan kesadaran akan bahaya kejahatan seksual mengakibatkan masalah tersebut tidak dapat ditangani dengan sebagaimana mestinya. Stigma buruk, kecenderungan menyalahkan korban, serta kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh banyak pelaku kejahatan seksual menghambat proses hukum dalam menangani kasus – kasus tersebut.

Gerakan #MeToo telah berhasil membawa perubahan yang cukup signifikan dalam mengubah dinamika kejahatan seksual di Amerika Serikat dari segi tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap masalah tersebut. Langkah – langkah advokasi telah ditempuh oleh #MeToo untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform efektif untuk menyebarkan testimoni para korban pelecehan dan kekerasan seksual, menggunakan tagar #MeToo serta narasi yang dihadirkan oleh testimoni para korban menjadi simbol pemersatu para korban dalam melawan kejahatan seksual, menggunakan aktor – aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar seperti selebriti yang menjadi alasan utama mengapa gerakan #MeToo menjadi viral pada awalnya dan politisi sebagai figur berpengaruh yang dapat memberikan keterwakilan kepada korban kejahatan seksual, dan lahirnya ME TOO CONGRESS ACT yang bertujuan untuk mempermudah proses pengaduan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di dalam Kongres, penyediaan bala bantuan hukum, serta menjamin pembayaran denda oleh pelaku kejahatan seksual yang terbukti bersalah sebagai sebuah langkah yang membuktikan akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat dalam menjalankan

fungsinya sebagai penggagas kebijakan – kebijakan yang mengatur dan menangani sebuah permasalahan, dalam hal ini yaitu kejahatan seksual.

Daftar Pustaka

- Burke, T. (2018). *Me Too Movement: History & Vision*. Diambil kembali dari Me Too Movement: <http://metoomovement.org>
- Davis, S. (2017, November 15). *'Me Too' Legislation Aims To Combat Sexual Harassment In Congress*. Diambil kembali dari National Public Radio: <https://www.npr.org/2017/11/15/564405871/me-too-legislation-aims-to-combat-sexual-harassment-in-congress>
- Kantor, J., & Twohey, M. (2017, October 5). *Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades*. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Kelly, C., & Hegarty, A. (2018, Oktober 4). *#MeToo was a culture shock. But changing laws will take more than a year*. Diambil kembali dari USA Today: <https://www.usatoday.com/story/news/investigations/2018/10/04/metoo-me-too-sexual-assault-survivors-rights-bill/1074976002/>
- Miller, T. R., Cohen, M. A., & Wiersema, B. (1996). *Victim Costs and Consequences: A New Look*. Washington DC: US Department of Justice.
- Rennison, C. M. (2002). *Rape and Sexual Assault: Reporting to Police and Medical Attention*. Washington DC: U.S. Department of Justice.
- Respers, L. (2017, October 16). *#MeToo: Social media flooded with personal stories of assault*. Diambil kembali dari CNN Entertainment: <https://edition.cnn.com/2017/10/15/entertainment/me-too-twitter-alyssa-milano/index.html>
- State of California Department of Justice. (2015, November 4). *Sex Offender Registration and Exclusion Information*. Diambil kembali dari Megan's Law: <http://www.meganslaw.ca.gov>
- Talbot, M. (2018, April 18). *THE WOMEN RUNNING IN THE MIDTERMS DURING THE TRUMP ERA*. Diambil kembali dari New Yorker: <https://www.newyorker.com/news/news-desk/2018-midterm-elections-women-candidates-trump>
- The United States Department of Justice. (2019, Januari 3). *Sexual Assault*. Diambil kembali dari The United States Department of Justice: <https://www.justice.gov/ovw/sexual-assault#sa>
- Wiessner, D. (2018, Oktober 5). *U.S. agency saw sharp rise in sexual harassment complaints after #MeToo*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-usa-harassment/u-s-agency-saw-sharp-rise-in-sexual-harassment-complaints-after-metoo-idUSKCN1ME2LG>

Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter during the #MeToo movement. *Public Relations Review*, 10-11.

Zimmer, B. (2017, Oktober 16). 'Casting Couch': *The Origins of a Pernicious Hollywood Cliché*. Diambil kembali dari The Atlantic:
<https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/casting-couch-the-origins-of-a-pernicious-hollywood-cliche/543000/>